

**ANALISIS SWOT TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN
PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM
MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN
(Studi Kasus Aplikasi PAKINTA Bapenda Kota Makassar)**

SKRIPSI



Sudiardi Salim

105731110520

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS SWOT TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN
PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM
MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN
(Studi kasus Aplikasi PAKINTA Bapenda Kota Makassar)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan Oleh:

SUDIARDI SALIM
105731110520

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Serjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

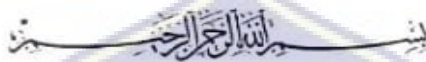
Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat, serta teman teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian :Analisi SWOT Transformasi Digital Layanan Pajak Daerah Kota Makassar Dalam Mendukung Inklusi Keuangan (studi kasus aplikasi Pakinta Bapenda Kota Makassar)
Nama Mahasiswa : Sudiardi Salim
No.Stambuk/NIM : 105731110520
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi :Univesitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 03 April 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar,03 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Amran, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN.0915116902

Pembimbing II

Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
NIDN. 0909107902

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mira, S.E., M.Ak., M.Ak
NBM. 128 6844



Dr. H. And Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama : Sudiardi Salim, Nim : 105731110520 diterima dan disahkan oleh panitia Ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 553/05/A.2-II/IV/45/2024 Tanggal 24 Ramadhan 1445 H/ 03 April 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 24 Ramadhan 1445 H
03 April 2024 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum	:	Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar)	 (.....)
Ketua	:	Dr.H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	 (.....)
Sekretaris	:	Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)	 (.....)
Penguji	:	1. Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak 2. Amran, SE., M.Ak., Ak., CA 3. Mira, S.E., M.Ak., Ak 4. Masrullah, S.E., M.Ak	 (.....)  (.....)  (.....)  (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM. 651 507



**FAKULTASEKONOMIDANBISNIS
UNIVERSITASMUHAMMADIYAHMAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.295 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudiardi Salim
Stambuk : 105731110520
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisi SWOT Transformasi Digital Layanan Pajak Daerah Kota Makassar Dalam Mendukung Inklusi Keuangan (studi kasus aplikasi Pakinta Bapenda Kota Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Sudiardi Salim
105731110520

Diketahui Oleh,

Ketua program studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM. 1286 844



Dr. H. Andi Yamin, S.E., M.Si
NBM. 651 507

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudiardi Salim
Stambuk : 105731110520
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisi SWOT Transformasi Digital Layanan Pajak Daerah Kota Makassar
Dalam Mendukung Inklusi Keuangan
(studi kasus aplikasi Pakinta Bapenda Kota Makassar)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 03 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Sudiardi Salim
NIM. 105731110520

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis SWOT Transformasi Digital Layanan Pajak Daerah Kota Makassar dalam Mendukung Inklusi Keuangan (studi kasus Aplikasi PAKINTA Bapenda Kota Makassar) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muh. Salim dan Ibu Dewi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini. Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Maret 2024

Sudiardi Salim

ABSTRAK

SUDIARDI SALIM. 2024. Analisis SWOT Transformasi Digital Layanan Pajak Daerah Kota Makassar dalam Mendukung Inklusi Keuangan (studi kasus Aplikasi PAKINTA Bapenda Kota Makassar). Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Amran dan Syamsuddin

Aplikasi PAKINTA merupakan inovasi layanan pajak daerah Kota Makassar yang menjadikan setiap transaksi pajak daerah dilakukan dengan menggunakan sistem jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran digitalisasi dalam mewujudkan inklusi keuangan pada Bapenda Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan teknik analisis data menggunakan matrix SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan mampu meningkatkan layanan Bapenda bagi wajib pajak dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan sehingga dapat mendukung meningkatkan inklusi keuangan.

Kata Kunci: Bapenda, Inklusi, Analisis SWOT



ABSTRACT

SUDIARDI SALIM. 2024. SWOT Analysis of Digital Transformation of Makassar City Regional Tax Services in Supporting Financial Inclusion (case studi of the Makassar City Bapenda PAKINTA Application). Thesis of the Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Amran and Syamsuddin

The PAKINTA application is an innovation in Makassar City regional tax services which means that every regional tax transaction is carried out using an internet network system. This research aims to find out the role of digitalization in realizing financial inclusion in the Bapenda at Makassar City. The method used in this research is qualitative and the data analysis technique uses the SWOT matrix. The results of this research show that by utilizing technological developments, especially financial technology, Bapenda can improve services for tax payers and reach a wider community. This convenience can attract people to take advantage of the services offered so that they can support increasing financial inclusion.

Keywords: Bapenda, Inclusion, SWOT Analysis



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAM PERSETUJUAN	iv
HALAM PENGESAHAN	v
HALAMAN KEABSAHAN	vi
HALAM PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
1. <i>Teori Technology Acceptance Model (TAM)</i>	7
2. Defenisi dan konsep transformasi digital dalam konteks sektor publik	8
3. Perkembangan teknologi informasi da komunikasi	10
4. Sistem informasi keuangan pemerintah daerah	13
5. Defenisi dan konsep inklusi keuangan	14

6. Peran inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial--	16
7. Analisis SWOT -----	18
B. Tinjauan Empiris -----	21
C. Kerangka Pemikiran -----	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN -----	26
A. Jenis Penelitian-----	26
B. Fokus penelitian -----	26
C. Lokasi dan waktu penelitian -----	26
D. Sumber Data -----	26
E. Teknik Pengumpulan Data -----	27
F. Defenisi Operasional Analisis SWOT -----	27
G. Metode Analisis-----	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAS -----	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian-----	32
B. Hasil Penelitian -----	40
1. Peran aplikasi PAKINTA dalam Mendukung Inklusi Keuangan serta meningkatkan PAD -----	40
2. Analisis SWOT penerapan PAKINTA di Bapenda Kota Makassar---	44
C. Pembahasan -----	46
1. Peran aplikasi PAKINTA dalam Mendukung Inklusi Keuangan -----	46
2. Analisis SWOT penerapan PAKINTA di Bapenda Kota Makassar---	49
BAB V PENUTUP -----	58
DAFTAR PUSTAKA -----	60
LAMPIRAN -----	

DAFTAR TABEL

Penelitian terdahulu -----	21
Analisis Matrix SWOT -----	45
Analisis Strategi Matrix SWOT -----	53



DAFTAR GAMBAR

Kerangka pikir -----	25
Struktur Organisasi-----	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi prioritas bagi banyak organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi di berbagai bidang tentunya memberikan kemudahan bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang di harapkan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam sistem transaksi keuangan juga telah memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas dalam proses administrasi keuangan pemerintah daerah, seperti pembayaran pajak, pembuatan laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Transformasi digital juga dapat memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang. Hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan pemerintah (Kemenkeu, 2022).

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas. Inklusi keuangan juga salah satu upaya penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Bank Indonesia, 2020). Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan keuangan bagi masyarakat di wilayahnya. Dalam era transformasi digital, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan mempercepat dan menyederhanakan transaksi keuangan (Saputri, 2021).

Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat di wilayahnya. Salah satu layanan transformasi digital yang di sediakan pemerinfah daerah Kota Makassar adalah aplikasi PAKINTA, yang dimana aplikasi PAKINTA (pajak terintegrasi terdigitalisasi) merupakan aplikasi induk untuk pengecekan dan pembayaran seluruh jenis pajak bagi wajib pajak di Kota Makassar yang sudah digunakan sejak tahun 2022. Aplikasi ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan memudahkan warga dalam membayar pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan lainnya. Aplikasi ini memungkinkan pembayaran pajak melalui berbagai metode, seperti OVO, Gopay, LinkAja, dan QRIS. Melalui PAKINTA, warga tidak perlu lagi repot-repot melakukan pembayaran pajak secara konvensional, karena cukup dengan mengunduh aplikasi PAKINTA di Google Play untuk dapat membayar pajak dan melakukan pengecekan pajak daerah.

Dalam konteks inklusi keuangan, transformasi digital pada layanan pajak daerah memiliki tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah aksesibilitas. Meskipun transformasi digital dapat mempercepat dan menyederhanakan proses layanan transaksi pajak daerah, tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap teknologi digital. Terutama di daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mampu secara finansial, akses terhadap teknologi digital dan infrastruktur yang mendukungnya mungkin masih terbatas (Kominfo, 2015).

Selain itu, keamanan dan privasi juga menjadi permasalahan yang penting dalam transformasi digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko keamanan seperti penipuan, pencurian identitas, dan serangan siber juga

semakin meningkat. Keamanan data dan privasi individu harus dijamin dengan kuat agar masyarakat merasa aman dan percaya dalam menggunakan transaksi keuangan digital dengan pemerintah (Kemenkeu, 2022).

Permasalahan lainnya adalah kurangnya literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat. Transformasi digital pada layanan transaksi pajak membutuhkan pemahaman dan keterampilan penggunaan teknologi digital yang memadai. Namun, tidak semua masyarakat memiliki tingkat literasi digital dan keuangan yang cukup untuk mengoperasikan sistem layanan digital dengan baik (Pradini & Susanti, 2021). Hal ini dapat menghambat inklusi keuangan karena masyarakat yang kurang terampil dalam penggunaan teknologi digital akan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan digital yang disediakan oleh pemerintah.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi internal dan eksternal suatu organisasi atau inisiatif (Rangkuti, Freddy, 2008). Dalam konteks ini, analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi transformasi digital transaksi keuangan pemerintah dalam mensupport inklusi keuangan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, pemerintah dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan peluang yang ada dalam mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas dan merata bagi seluruh masyarakat (Saputri, 2021).

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah khususnya Bapenda kota Makassar dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam era transformasi digital. Dengan ada aplikasi PAKINTA bukti dari transformasi digital yang merupakan salah satu aplikasi layanan transaksi pajak daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor permasalahan tersebut, Bapenda Kota Makassar dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat transformasi digital dalam layanan pajak daerah dan mendorong inklusi keuangan yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SWOT transformasi digital layanan pajak daerah dalam mendukung inklusi keuangan dengan fokus pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran aplikasi PAKINTA dalam Mendukung Inklusi Keuangan?
- b. Bagaimana Analisis SWOT penerapan aplikasi PAKINTA di Bapenda Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran aplikasi PAKINTA dalam Mendukung Inklusi Keuangan
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara strategi yang dapat diusulkan untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dalam transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah guna mendorong inklusi keuangan yang lebih baik.

D. MANFAAT

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana transformasi digital dapat diterapkan dalam transaksi keuangan pemerintah daerah. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan teori-teori dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan konsep inklusi keuangan di tingkat pemerintah daerah.

- b. .Manfaat Praktis

Meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi keuangan: Transformasi digital dalam transaksi keuangan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meningkatkan efisiensi serta akurasi transaksi keuangan. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam implementasi transformasi digital, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan yang relevan.

c. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada pemerintah daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengadopsi transformasi digital dalam transaksi keuangan. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan strategi inklusi keuangan yang berbasis teknologi secara efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) diperkenalkan oleh Davis (1985) adalah model teoritis untuk memprediksi perilaku individu untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi terbaru (Kawitan dan Sulistyawati, 2021). Menurut *Technology Acceptance Model (TAM)* perilaku penggunaan sistem ditentukan oleh niat untuk menggunakan sistem tertentu. Kemudian ditentukan oleh *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) yang dirasakan dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan) yang dirasakan saat penggunaan sistem. *Technology Acceptance Model (TAM)* memiliki unsur perilaku yang kuat, menganggap bahwa ketika seseorang membentuk suatu niat untuk bertindak, maka mereka akan bebas untuk bertindak tanpa batasan. Di dunia nyata akan ada banyak kendala, seperti terbatasnya kebebasan untuk bertindak (Suyanto dan Kurniawan, 2019).

Model *Technology Acceptance Model (TAM)* menyatakan bahwa seorang pengguna sistem cenderung menggunakan apabila sistem mudah digunakan dan memberikan bermanfaat. *Technology Acceptance Model (TAM)* niat seseorang untuk menggunakan sistem atau teknologi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Anarjia dan Rante, 2018).

1) Kemanfaatan (Perceived Of Usefulness) *Perceived of usefulness* diartikan sebagai sebuah keyakinan pengguna bahwa menggunakan suatu sistem dapat memberikan peningkatan terhadap performanya (Davis, 1989). Hal ini sejalan dengan definisi kata *Useful* yang memiliki arti bermanfaat atau berguna. Dalam beberapa kasus, *Perceived of usefulness* juga diartikan sebagai keuntungan.

2) Kemudahan dalam Penggunaan (Ease of Use)

Ease of use suatu ukuran keyakinan pengguna teknologi tertentu bahwa penggunaan suatu sistem akan memberi keleluasaan untuk tidak mengeluarkan usaha lebih. Hal ini berdasar pada definisi kata (Ease) kemudahan yang berarti kebebasan dari kesulitan atau usaha yang berlebih.

2. Definisi dan konsep transformasi digital dalam konteks organisasi dan sektor publik

Transformasi digital dalam konteks organisasi dan sektor publik mengacu pada perubahan menyeluruh dalam cara organisasi dan lembaga pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah operasi, proses bisnis, dan memberikan nilai tambah kepada stakeholders mereka. Ini melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data, komputasi awan, Internet of Things (IoT), dan lainnya, untuk mengubah cara organisasi beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan atau masyarakat, dan menciptakan keunggulan kompetitif.

Beberapa aspek penting dari transformasi digital dalam organisasi dan sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) **Pengoptimalan proses bisnis:** Transformasi digital memungkinkan organisasi dan sektor publik untuk memperbaiki, mengotomatisasi, dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. (Tulugen & Saerang, 2022)
- b) **Pengembangan produk dan layanan inovatif:** Transformasi digital memungkinkan organisasi dan sektor publik untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Dengan menggunakan teknologi baru, seperti AI atau IoT, organisasi dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, menghadirkan produk yang lebih pintar, dan menyediakan layanan yang lebih personal. (BPD DIY, 2021)
- c) **Meningkatkan interaksi dengan pelanggan atau masyarakat:** Transformasi digital memungkinkan organisasi dan sektor publik untuk berinteraksi secara lebih baik dengan pelanggan atau masyarakat. Melalui penggunaan platform digital, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih mudah diakses, meningkatkan komunikasi, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan atau masyarakat. (Junaidi, 2021)
- d) **Pengambilan keputusan berbasis data:** Transformasi digital memungkinkan organisasi dan sektor publik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif. Dengan mengumpulkan data yang relevan, organisasi dapat mengambil keputusan

yang lebih baik dan lebih terinformasi, serta mengidentifikasi tren dan peluang baru. (Putri & Hariyanti, 2022)

- e) Meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas: Transformasi digital memungkinkan organisasi dan sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas dalam operasi mereka. Dengan menggunakan alat dan platform kolaborasi digital, tim dan departemen dapat bekerja secara lebih efektif, berbagi informasi dengan mudah, dan bekerja secara terkoordinasi.
- f) Keamanan dan privasi data: Transformasi digital juga membutuhkan perhatian yang serius terhadap keamanan dan privasi data. Organisasi dan sektor publik perlu mengadopsi langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pelanggan atau masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi yang berlaku.

Dalam rangka mencapai transformasi digital yang sukses, organisasi dan sektor publik perlu memiliki visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan keterlibatan yang luas dari seluruh anggota organisasi. Hal ini melibatkan perubahan budaya, perubahan operasional, dan investasi dalam infrastruktur dan kapabilitas digital.

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung transformasi digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memainkan peran sentral dalam mendukung transformasi digital di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa perkembangan terkini dalam TIK yang telah berkontribusi pada transformasi digital:

- a) Internet of Things (IoT): IoT adalah jaringan objek fisik yang terhubung dengan internet, yang memungkinkan pertukaran data dan interaksi antara perangkat-perangkat tersebut. Dalam konteks transformasi digital, IoT memungkinkan pengumpulan dan analisis data real-time dari berbagai sumber, seperti perangkat wearable, sensor pintar, dan peralatan industri. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan (Farhan & Salsabil, 2019)
- b) Big Data dan Analitik: Perkembangan dalam kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data telah membuka peluang baru dalam menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan data besar. Teknik analitik canggih, seperti analisis prediktif dan machine learning, memungkinkan organisasi untuk mengeksplorasi pola dan tren yang terkandung dalam data mereka. Dengan memanfaatkan big data dan analitik, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, mengidentifikasi peluang baru, dan mengoptimalkan proses bisnis mereka (Aldisa & Maulana, 2022)
- c) Cloud Computing: Cloud computing telah menjadi fondasi penting dalam transformasi digital. Dengan menggunakan infrastruktur cloud, organisasi dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data dan aplikasi secara fleksibel melalui internet. Layanan cloud juga memungkinkan kolaborasi tim yang lebih baik, skalabilitas yang mudah, dan aksesibilitas global. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya infrastruktur,

dan mempercepat pengembangan produk dan layanan (Rumetna, 2018)

d) Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI): AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi AI telah mempengaruhi banyak aspek transformasi digital, mulai dari chatbot yang canggih untuk layanan pelanggan hingga pemrosesan bahasa alami dan pengenalan wajah. Dalam dunia bisnis, AI juga digunakan untuk analisis data yang kompleks, otomatisasi proses, personalisasi pengalaman pengguna, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

e) Mobile Technology: Perkembangan dalam teknologi mobile telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan melakukan bisnis. Dengan adopsi yang luas dari smartphone dan tablet, organisasi dapat menyediakan aplikasi dan layanan berbasis mobile yang memungkinkan akses informasi yang mudah dan cepat. Mobile technology juga memungkinkan pembayaran digital, komunikasi real-time, dan akses ke layanan berbasis lokasi, yang semuanya mendukung transformasi digital.

Perkembangan dalam TIK ini secara signifikan telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, manufaktur, dan pemerintahan. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, kita dapat mengharapkan transformasi digital yang lebih besar dan inovasi yang lebih lanjut di masa depan.

4. Sistem informasi keuangan pemerintah daerah

Ada berbagai sistem informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Pilihan sistem informasi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan teknologi yang ada di setiap daerah. Berikut ini beberapa contoh sistem informasi keuangan yang umum digunakan oleh pemerintah daerah:

- a) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Sistem ini dirancang khusus untuk pemerintah daerah dan dapat mencakup berbagai modul seperti anggaran, akuntansi, perencanaan keuangan, pengeluaran, pendapatan, serta pelaporan keuangan. SIKD membantu mengelola dan memonitor keuangan daerah serta memudahkan proses pengelolaan keuangan secara transparan (Wartin & Yasa, 2016).
- b) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIK) Sistem ini digunakan untuk mengelola transaksi keuangan, mencatat dan melacak pendapatan, pengeluaran, aset, utang, dan kewajiban keuangan pemerintah daerah. SIK biasanya menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Srihastuti & Suaidah, 2020).
- c) Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMAK) SIMAK membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan pemerintah daerah. Sistem ini mencakup pemantauan anggaran, pengelolaan kas, pengendalian anggaran, serta pelaporan dan analisis keuangan (Kusuma, 2021).

- d) Sistem Informasi Penganggaran (SIP) SIP digunakan untuk proses perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Sistem ini membantu dalam menyusun anggaran, melakukan pemantauan realisasi anggaran, serta melacak penggunaan dana secara efektif dan efisien (Sanjaya & Sucipta, 2017).
- e) Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) SIMA digunakan untuk mengelola aset pemerintah daerah seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan inventaris lainnya. Sistem ini membantu dalam pencatatan, pemeliharaan, pengalokasian, dan pelaporan mengenai aset pemerintah daerah.

Perlu diketahui bahwa masing-masing daerah dapat memiliki sistem informasi keuangan yang berbeda-beda, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan setempat. Sistem-sistem di atas hanyalah contoh umum yang sering digunakan.

5. Definisi dan konsep inklusi keuangan

Inklusi keuangan adalah konsep di mana individu dan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, seperti perbankan dan asuransi, diberikan kesempatan untuk mengakses layanan tersebut. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka, dapat mengakses dan memanfaatkan produk keuangan yang aman, terjangkau, dan bermanfaat (OJK, 2018).

Inklusi keuangan adalah konsep yang mencakup tiga dimensi utama: akses ke layanan keuangan, keterjangkauan, dan penggunaan layanan keuangan

Akses ke layanan keuangan, Ini mengacu pada kemampuan individu dan kelompok untuk memperoleh dan menggunakan berbagai layanan keuangan yang tersedia. Hal ini melibatkan adanya infrastruktur keuangan yang mencakup lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan penyedia layanan keuangan digital. Akses yang inklusif berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan layanan ini tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu.

Keterjangkauan, Ini berarti bahwa biaya yang terkait dengan penggunaan layanan keuangan harus terjangkau bagi individu dengan berbagai tingkat pendapatan. Keterjangkauan melibatkan biaya yang rendah, termasuk biaya administrasi, suku bunga, dan biaya transaksi, sehingga tidak menjadi beban yang berat bagi individu yang berpenghasilan rendah.

Penggunaan layanan keuangan, Ini mencakup tingkat partisipasi dan penggunaan aktif dari layanan keuangan yang tersedia. Penggunaan yang tinggi menunjukkan bahwa individu dan kelompok tersebut secara efektif memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan keuangan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang bijaksana (Bank Indonesia, 2020).

Inklusi keuangan bertujuan untuk mengatasi kesenjangan finansial dan memberikan akses yang lebih luas kepada individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Dengan memastikan

akses, keterjangkauan, dan penggunaan layanan keuangan yang inklusif, inklusi keuangan berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara keseluruhan.

6. Peran inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial

Inklusi keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Ini merujuk pada upaya untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bermanfaat bagi individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal (Adriani & Wiksuan, 2018).

Berikut adalah beberapa peran inklusi keuangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial:

- a) Mendorong pertumbuhan ekonomi: Inklusi keuangan memungkinkan individu dan kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan untuk mengakses pinjaman, tabungan, dan layanan keuangan lainnya. Ini membuka pintu bagi mereka untuk memulai usaha baru, mengembangkan bisnis, dan berinvestasi dalam pendidikan atau pelatihan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- b) Mengurangi kemiskinan: Dengan memberikan akses ke layanan keuangan yang terjangkau, inklusi keuangan membantu individu dan keluarga untuk mengatasi tantangan finansial dan mengurangi kemiskinan. Tabungan dan kredit yang terjangkau memungkinkan mereka untuk menghadapi kejadian

tak terduga, membiayai pendidikan anak-anak, dan berinvestasi dalam aset produktif.

- c) Meningkatkan stabilitas keuangan: Inklusi keuangan dapat membantu mengurangi ketidakstabilan ekonomi dengan memperluas akses ke layanan keuangan formal. Melalui penyediaan instrumen keuangan yang aman dan terjangkau, individu dan kelompok dapat melindungi diri mereka dari risiko dan membangun cadangan untuk masa depan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan sosial: Dengan inklusi keuangan, individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan memiliki akses yang lebih baik ke berbagai layanan keuangan yang mendorong kesejahteraan sosial. Mereka dapat mengakses asuransi kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, dan layanan keuangan lainnya yang membantu menjaga kesehatan, mempromosikan inklusi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup.
- e) Mendorong kesetaraan gender: Inklusi keuangan juga dapat berperan dalam memajukan kesetaraan gender. Dalam banyak masyarakat, perempuan seringkali menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses layanan keuangan. Dengan memperluas akses mereka ke layanan keuangan, inklusi keuangan dapat membantu mengurangi kesenjangan gender, memberdayakan perempuan, dan mendorong partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan (Adriani & Wiksuan, 2018).

Secara keseluruhan, inklusi keuangan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan stabilitas keuangan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memajukan kesetaraan gender. Ini juga mempromosikan inklusi sosial yang lebih luas dan memberdayakan individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

7. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam sebuah situasi atau konteks tertentu. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek, strategi bisnis, produk, atau individu (Saputri, 2021).

Berikut adalah konsep dan prinsip dasar dalam analisis SWOT:

Kekuatan (Strengths): Kekuatan merupakan sumber daya internal atau faktor-faktor positif yang memberikan keunggulan kompetitif. Hal-hal yang menjadi kekuatan dapat meliputi aset fisik, keterampilan karyawan, keunggulan teknologi, merek yang kuat, keunggulan operasional, atau hubungan yang baik dengan pelanggan.

Kelemahan (Weaknesses): Kelemahan merujuk pada faktor-faktor internal yang dapat menghambat keberhasilan. Ini bisa termasuk kekurangan sumber daya, keterbatasan teknologi, keterampilan yang kurang, proses bisnis yang tidak efisien, atau kurangnya visibilitas merek.

Peluang (Opportunities): Peluang adalah faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Peluang bisa muncul dari perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, atau kelemahan. Mengidentifikasi peluang memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. (Rangkuti, Freddy, 2008)

Ancaman (Threats): Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat kesuksesan atau menyebabkan. Ancaman bisa datang dari pesaing yang kuat, perubahan regulasi, perubahan tren konsumen, atau krisis ekonomi. Mengidentifikasi ancaman membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif. (Rangkuti, Freddy, 2008)

Prinsip-prinsip dasar dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut:

- a) Internal dan eksternal: Analisis SWOT memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi situasi atau organisasi. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor internal yang dapat dikendalikan oleh organisasi, sementara peluang dan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang di luar kendali langsung organisasi.
- b) Evaluasi objektif: Analisis SWOT harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta yang dapat dipercaya. Informasi yang diperoleh harus akurat dan didukung oleh bukti atau data yang valid.
- c) Pertimbangkan konteks: Analisis SWOT harus selalu dilakukan dalam konteks yang relevan. Konteks dapat berupa industri tertentu, pasar geografis, produk atau layanan tertentu, atau situasi bisnis yang spesifik.

- d) Identifikasi tindakan: Analisis SWOT tidak hanya tentang mengidentifikasi faktor-faktor, tetapi juga tentang mengidentifikasi tindakan atau strategi yang dapat diambil berdasarkan temuan analisis. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman.
- e) Penilaian berkelanjutan: Analisis SWOT tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Kondisi dan faktor-faktor yang relevan dapat berubah seiring waktu, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian secara teratur.

Analisis SWOT adalah alat yang berguna untuk membantu perusahaan atau individu dalam mengidentifikasi posisi mereka di pasar atau situasi tertentu, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis.



B. Tinjauan Empiris

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya terkait dengan proses transformasi digital (e-governance) di lingkungan Pemda. Adapun berikut beberapa jurnal penelitian yang menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Fajrianto / 2022	Implementasi Peran E-government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 indikator yang digunakan dalam penelitian yang wajib dipublikasikan pada website resmi pemerintah, tidak satu pun yang tersedia dan dapat diakses oleh publik khususnya masyarakat Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai belum melaksanakan tuntutan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang merupakan

				pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Haryono dan Oktavianus Abridinata Jering / 2020	Analisi Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transaksi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pematintah Daerah Kabupaten Landak	kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi.	Prosedur pelaksanaan transaksi non tunai pada pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) dan pemindahbukuan dilakukan sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, sedangkan Pelaksanaan transaksi non tunai pada pendapatan berupa pembayaran PBB Online dilakukan sesuai Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Sistem transaksi non tunai dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Landak.

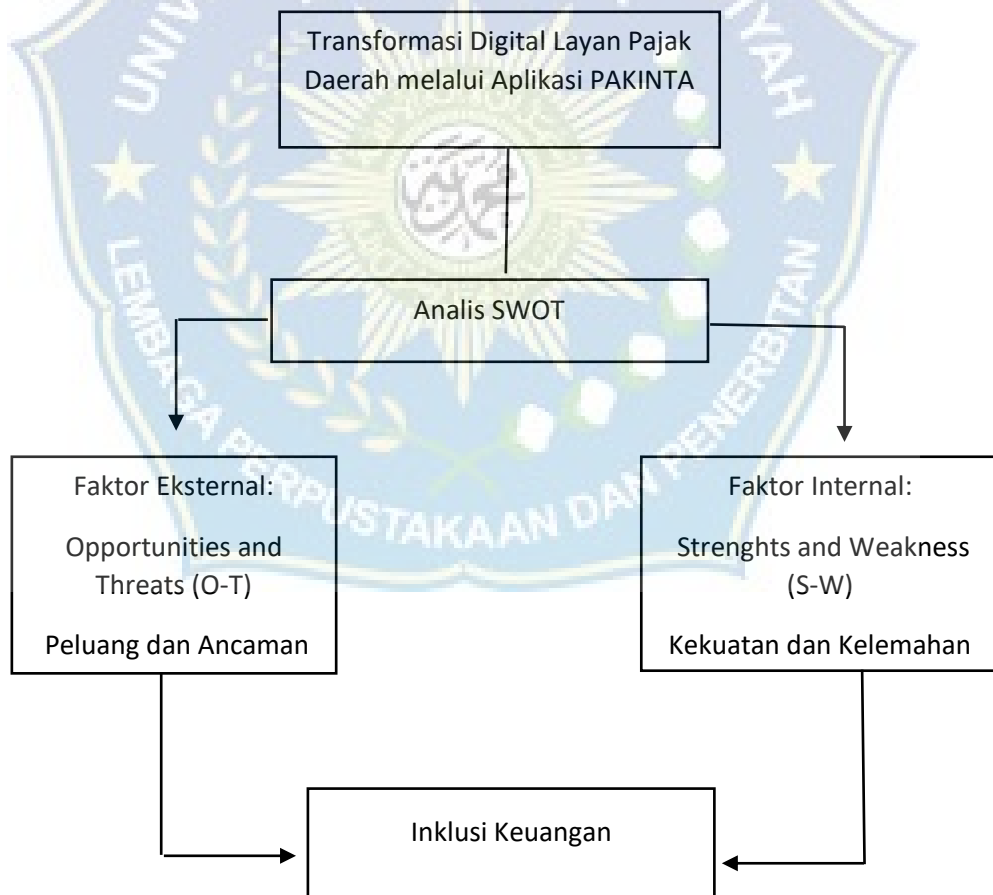
				Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga mutasi saldo dapat diketahui secara real time oleh Pemerintah Daerah.
3	I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini / 2020	Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (<i>Digital Local Government</i>)	Kualitatif	Hasil penelitian nunjukan bahwa. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa belum semua Pemerintah Kabupaten dapat menerapkan Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah secara maksimal, hal itu disebabkan oleh beberapa aspek, baik aspek Sumber Daya Manusia, aspek ketersediaan anggaran daerah serta aspek kesiapan teknis (sarana, prasarana serta jaringan internet). Untuk mendorong perkembangannya Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya guna mempercepat daerah-daerah lain dapat meniru apa yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota

				Surabaya, salah satunya dengan mengadakan Lomba Inovasi Daerah setiap tahunnya.
4	Agus Widarsono / 2013	Pengaruh Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan informasi efektif teknologi berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten pemerintahan. Efektivitas penerapan teknologi informasi memberikan dampak 53,0% terhadap kualitas laporan keuangan pejabat pemerintahan kabupaten, badan dan kantor di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Sementara sisanya 47,0% merupakan pengaruh faktor lain di luar efektifitas penerapan teknologi Informasi
5	Dede Abdurahman, Tri Ferga Prasetyo / 2018	Analisis dan Perancangan E-Government Dalam Transparansi Sistem Pemerintah Daerah	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif	Dari hasil analisis dan perancangan e-government dalam transparansi sistem pemerintahan Desa, Perancangan Pelayanan di desa berbasis e-government dapat diterapkan dengan berbagai persyaratan baik Sumber Daya Manusia maupun peralatan pendukung dibidang TIK untuk

				terlaksananya Pelayanan Desa yang prima. Penulis juga sudah membuat rancangan aplikasi pelayanan berbasis e-government berdasarkan analisis penulis terhadap 2 desa yaitu desa tanjungsari dan desa tenjolayar.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2009)

Mengumpulkan data dan informasi tentang implementasi transformasi digital dalam transaksi keuangan pemerintah daerah serta upaya yang dilakukan untuk mensuport inklusi keuangan. Data tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah, program-program yang telah dilaksanakan, statistik terkait inklusi keuangan, dan dokumentasi terkait. Data ini akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang ada

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Analisis SWOT Transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah Kota Makassar melalui Aplikasi PAKINTA dalam mendukung inklusi keuangan, dan juga berbagai pengembangan konsep strategi yang apa yang diterapkan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember.

D. Sumber Data

Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait. Wawancara ini akan membantu memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan, peluang, dan strategi yang telah atau sedang dilakukan dalam transaksi keuangan pemerintah daerah.

F. Defenisi Oporasional Analisis SWOT

Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai : “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats)” (Rangkuti, 2013).

Analisis SWOT adalah suatu teknik yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berdampak pada keberhasilan strategis organisasi. Berikut adalah beberapa indikator yang bisa dipertimbangkan:

1. Kekuatan (Strengths):

- a) **Infrastruktur Teknologi:** Evaluasi kemampuan infrastruktur teknologi saat ini, termasuk konektivitas internet, keamanan data, dan perangkat yang digunakan untuk transaksi keuangan.
- b) **Sumber Daya Manusia:** Tinjau kualitas dan jumlah personel yang terampil dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi keuangan di pemerintah daerah.
- c) **Kebijakan dan Regulasi:** Analisis apakah ada kebijakan dan regulasi yang mendukung atau membatasi implementasi teknologi keuangan di tingkat pemerintah daerah.

2. Kelemahan (Weaknesses):

- a) **Kesenjangan Teknologi:** Identifikasi keterbatasan teknologi yang ada dan kekurangan dalam sistem transaksi keuangan yang dapat menghambat inklusi keuangan.
- b) **Kurangnya Kesadaran:** Tinjau tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya di daerah-daerah tertentu.
- c) **Keterbatasan Anggaran:** Evaluasi apakah ada keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi keuangan.

3. Peluang (Opportunities):

- a) **Pertumbuhan Pengguna Internet dan Smartphone:** Tinjau pertumbuhan jumlah pengguna internet dan ponsel pintar di wilayah

pemerintah daerah sebagai peluang untuk menerapkan layanan keuangan digital.

- b) Kerjasama dengan Pihak Swasta: Identifikasi peluang kerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan atau lembaga keuangan untuk mengembangkan solusi inklusi keuangan.
- c) Program Pemerintah Pusat: Tinjau apakah ada program dari pemerintah pusat yang mendukung transformasi digital di daerah, seperti insentif atau dana bantuan.

4. Ancaman (Threats):

- a) Keamanan dan Privasi: Tinjau potensi ancaman keamanan dan privasi dalam menggunakan teknologi keuangan, seperti ancaman kejahatan siber atau penyalahgunaan data.
- b) Ketidaksetaraan Akses Teknologi: Evaluasi apakah pengenalan teknologi keuangan dapat meningkatkan kesenjangan antara masyarakat yang terhubung dan tidak terhubung.
- c) Perubahan Kebijakan: Tinjau potensi perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi teknologi keuangan di pemerintah daerah.

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor di atas, analisis SWOT dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mendukung transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah untuk mendorong inklusi keuangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data baik melalui observasi langsung dilapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informasi yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu: reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data untuk membangun pemahaman umum mengenai analisis (Miles & Huberman, 2014).

1. Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan – catatan yang diperoleh dari pengumpulan data agar dapat dikelola dan lebih mudah dipahami. Data diringkas, diabstraksikan dan difokuskan pada isu, tema, dan pola utama
2. Penyajian data adalah kegiatan pengorganisasian dan penyajian data informasi dalam bentuk teks naratif, tabel, diagram atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan yang memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verivikasi berupa tinjauan ulang pada catatan – catatan data yang didapatkan. dimana dalam analisis deskriptif kualitatif yaitu salah salah satu jenis penelitian mengungkapkan

kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat pertentangan antara dua keadaan atau lebih hubungan antar variabel timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAPENDA Kota Makassar

Sebelum terbentuknya dinas pendapatan kotamadya tingkat II Makassar dinas pasar dinas air minum dan dinas penghasilan daerah dibentuk berdasarkan surat keputusan walikotamadya nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa bub dinas pemeriksaan kendaraan tidakbermotor dan sub dinas administrasi. Dengan adanya keputusan walikotamadya daerah tingkat II ujung pandang nomor 74/S Kep/A/V/1977 tanggal 1 april 1977 bersama dengan surat edaran mentri dalam negeri nomor 3/12/43 tanggal September 1975 nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah kotamadya ujung pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi dinas penghasilan daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti dinas perpajakan dinas pasr dan sub dinas pelelangan ikan dan semuan subsub dinas dalam unit pengahasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja dinas pendapatan daerah kota madya tingkat II ujung pandang seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi kota Makassar secara otamatis nama dinas pendapatan daerah kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi dinas pendapatan daerah kota Makassar. Kemudian dinas pendapatan daerah kota Makassar ditahun 201 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Visi dan Misi Instansi/Instansi

a. Visi

Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal, Online Terpadu

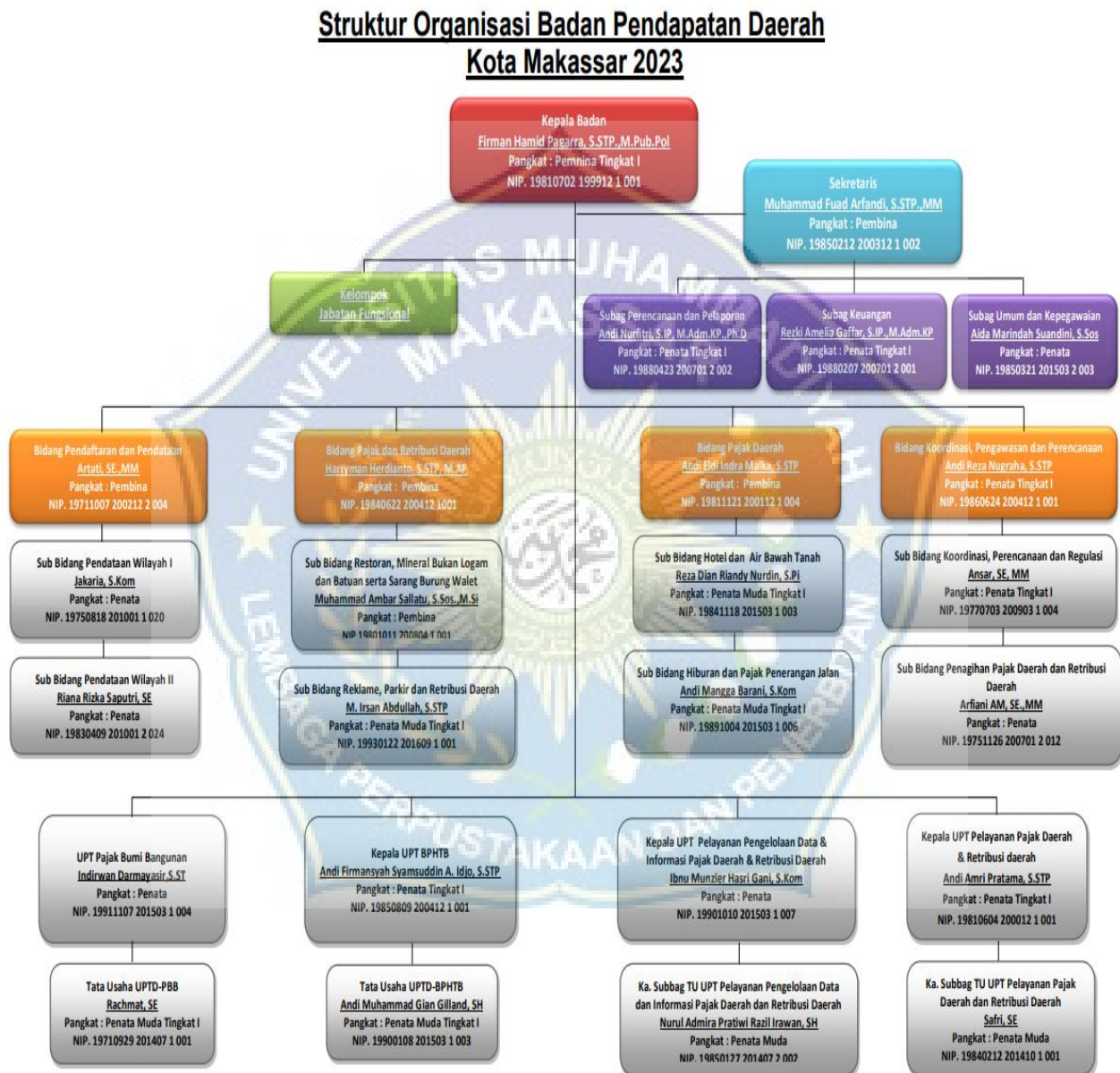
b. Misi

1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegritasi
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
3. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.



3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi Bapenda Kota Makassar



Deskripsi Pekerjaan

a. Kepala Badan

Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretariat

Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

d. Subbagian Keuangan

Pasal 7, Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga,

kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

f. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

g. Subbidang Pendataan Wilayah I

Pasal 10, Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

h. Subbidang Pendataan Wilayah II

Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang

i. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

j. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet

Pasal 14, Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

k. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Pasal 15, Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

l. Bidang Pajak Daerah II

Pasal 17, Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

m. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Pasal 18, Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah.

n. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Pasal 19, Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

o. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Pasal 21, Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

p. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Pasal 22, Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviu dan analisa perundangundangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

q. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 23, Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

h. Sub bidang UPT Pajak Bumi Bangunan

i. Tata Usaha UPTD-PBB

J. Kepala UPT BPHTB

k. Tata Usaha UPT-BPHTB



B. HASIL PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai peran PAKINTA dalam mendukung Inklusi keuangan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan peluang dan tantangan penerapan aplikasi Pakinta di bapenda Kota Makassar menggunakan analisa SWOT. Temuan hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan pegawai yang ada di bapenda terkait peluang dan tantangan penerapan aplikasi Pakinta serta tingkat efektifitas digitalisasi dalam mendukung inklusi keuangan dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

1. Peran aplikasi PAKINTA dalam Mendukung Inklusi Keuangan

Perkembangan teknologi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat seperti mendorong inklusi keuangan melalui transaksi digital. Hadirnya aplikasi Pakinta yang menjadi salah satu bentuk transformasi digital sangat membantu masyarakat Kota Makassar dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol selaku kepala badan Bapenda Kota Makassar;

“adanya aplikasi pakinta di era digital sangat membantu bapenda serta wajib pajak sendiri karena memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dimana kita bisa mengakses dimana dan kapanpun”

Sama halnya yang disampaikan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bahwa;

“iya, adanya aplikasi pakinta dalam era digital saat ini sangat membantu masyarakat kota makassar untuk membayar pajak daerahnya seperti contohnya pbb dimana wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pembayaran”

Lebih lanjut pendapat dari wajib pajak selaku pengguna aplikasi bahwa;

“saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi pakinta yang di sediakan bapenda dimana kita sudah bisa banyak pajak lewat hp, jadi saya tidak perlu lagi ke kantor apalagi dan tidak menyita waktu yang banyak”

Penggunaan aplikasi PAKINTA memiliki peran yang cukup penting terhadap peningkatan inklusi keuangan. Hal tersebut disebabkan karena PAKINTA memanfaatkan teknologi dalam membantu masyarakat untuk mengakses pembayaran pajak lebih mudah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol selaku kepala badan bapenda kota Makassar bahwa;

“Pakinta sangat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, dimana wajib pajak dengan mudah mengecek serta membayar pajak tanpa harus datang ke kantor. Dengan adanya pakintamaka wajib pajak atau masyarakat makassar dapat mengakses dengan mudah berbagai jenis layanan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu dan tanpa hambatan”

Lebih lanjut dipaparkan oleh pegawai bapenda kota Makasar bahwa;

“pakinta memiliki peran penting terlebih lagi seperti kondisi saat ini banyak masyarakat makassar yang memiliki waktu yang terbatas jadi pakinta bisa memudahkan masyarakat makassar membayar pajak dengan tepat waktu tanpa jauh-jauh ke kantor”

PAKINTA menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Keberadaan PAKINTA semakin diuntungkan dengan masifnya penggunaan smartphone oleh masyarakat, bahkan hingga daerah yang jauh dari pusat kota, menjadi sarana penghubung dan solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Merujuk pada hal tersebut, Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol selaku kepala badan bapenda kota Makassar bahwa;

“pembayaran digitalisasi dapat membantu masyarakat makassar dalam jasa pelayanan pembayaran pajak lebih efektif dan efisien, serta sudah mulai

berkembang dan sudah efektif dari sisi waktu dan biaya. Namun tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan”

Lebih lanjut dipaparkan oleh pegawai bapenda kota Makassar bahwa;

“bapenda dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada salah satunya digitalisasi sesuai dengan misi bapenda itu sendiri. Dimana digital ini bertujuan untuk membuat inovasi serta melihat apakah masyarakat sudah menguasai transaksi digital atau tidak. Jika dulu pelayan pembayaran pajak harus ke kantor, sekarang masyarakat cukup melakukannya melalui hp”

Hambatan utama dalam keuangan inklusif ialah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Rendahnya literasi keuangan dan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang transaksi digital, adapun langkah atau strategi apa yang dilakukan pihak bapenda untuk menarik wajib pajak dalam penggunaan aplikasi pakinta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol selaku kepala badan bapenda kota Makassar bahwa;

“untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kota makassar awal memperkenalkan aplikasi pakinta kami dari bapenda menyiapkan boot untuk layanan pajak di sejumlah pusat perbelanjaan di makassar”

Lebih lanjut dipaparkan oleh pegawai bapenda kota Makassar bahwa;

“kita juga datang langsung warga, ada juga warga yang datang karena bootnya ada di depan pintu masuk. Kita sosialisasikan aplikasi pakinta ini terkait dimana kita bisa membayar pajak lebih mudah lagi lewat aplikasi pakinta yang transaksinya bisa melalui via ovo, gopay, linkajadan beberapa proses pembayaran lainnya.”

Berdasarkan hal tersebut sosialisasi dan kreatifitas dalam memperkenalkan layanan aplikasi pakinta merupakan mekanisme yang dilakukan Bapenda Kota Makassar dalam mewujudkan inklusi keuangan untuk menjangkau seluruh masyarakat kota makassar.

2. Analisis SWOT penerapan PAKINTA di Bapenda Kota Makassar

2.1. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

a. kekuatan

Aplikasi PAKINTA menjadi salah satu bentuk upaya dalam mendukung inklusi keuangan. Dalam penerapan transaksi digital Bapenda terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Dengan memberikan kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan dan kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak daerah kapan saja dan di mana saja. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol selaku kepala badan Bapenda Kota Makassar;

“adanya aplikasi pakinta di era digital sangat membantu bapenda serta wajib pajak sendiri karena memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dimana kita bisa mengakses dimana dan kapanpun”

Sama halnya yang disampaikan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar bahwa;

“iya, adanya aplikasi pakinta dalam era digital saat ini sangat membantu masyarakat kota makassar untuk membayar pajak daerahnya seperti contohnya pbb dimana wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pembayaran”

Lebih lanjut pendapat dari wajib pajak selaku pengguna aplikasi bahwa;

“saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi pakinta yang di sediakan bapenda dimana kita sudah bisa banyak pajak lewat hp, jadi saya tidak perlu lagi ke kantor apalagi dan tidak menyita waktu yang banyak”

b. Kelemahan

Perkembangan teknologi informasi khususnya PAKINTA memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat disamping itu tentunya memiliki

kekurangan dalam transaksi keuangan yang menggunakan layanan aplikasi digital, akses jaringan internet menjadi salah satu hambatan dasarnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol kepala badan Bapenda Kota Makassar bahwa;

“sejauh ini aplikasi pakinta tidak terlalu ada kendala, ya paling terkendala jaringan yang di gunakan masing masing wajib pajak”

Lebih lanjut pula dijelaskan oleh pegawai Bapenda Kota Makassar bahwa;

“penggunaan aplikasi pakinta di bapenda sendiri tidak ada kendala, kecuali kendala jaringan pada masing masing wajib pajak itu sendiri”

Di sisi lain pendapat dari wajib pajak selaku pengguna aplikasi PAKINTA bahwa;

“alhamdulillah, selama ini saya tidak mengalami kendala yang bisa di bilang fatal dalam menggunakan pakinta. hanya terkadang begitu jaringan jelek”

2.2. Identifikasi Peluang dan Ancaman

a. Peluang

Hadirnya aplikasi PAKINTA memberikan peran yang cukup besar dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah bagi Bapenda Kota Makassar melalui aplikasi PAKINTA. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol kepala badan Bapenda Kota Makassar bahwa;

“Pakinta memiliki peran yang besar dalam peningkatan PAD dimana tahun 2023 ini akan tercatat sebagai sejarah. Kita berhasil meraih PAD Rp1,5 trilliun. Ini tertinggi sepanjang sejarah pemkot makassar”

Lebih lanjut pula dijelaskan oleh pegawai Bapenda Kota Makassar bahwa;

“Pakinta banyak diminati masyarkat buktinya sudah ada 2.400 orang yang mengunduh atau mengakses pakinta. kebanyakan dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)”

b. Ancaman

Pada dasarnya transaksi digital banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, kemudahan ini mengandung berbagai macam resiko, salah satunya terbuka peluang terjadinya *cybercrime*. Oleh karena itu, bapenda perlu menangani masalah perangkat keamanan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol selaku kepala bapenda;

“cybercrime saat ini sangat meresahkan, diikuti dengan era milenials sekarang dimana segala aktifitasnya menggunakan teknologi menjadi salah satu ancaman. Oleh karena itu, dalam perlindungan aplikasi pakinta, membuat sistem perlindungan agar tidak terjadi cybercrime”

Lebih lanjut dipaparkan oleh pegawai bapenda kota Makasar bahwa

“adanya cybercrime menuntut bapenda meningkatkan keamanan karena pelaku pasti selalu ,encari celah untuk melancarkan aksi kejahatan. Untuk meminimalisirkan kami meningkatkan keamanan dengan metode verifivation”

Tabel 4.2

Tabel Analisis Matrix SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (s)	Kelemahan (W)
	1. Tingkat penggunaan internet yang tinggi dan masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi elektronik 2. kemudahan dalam akses data layanan keuangan dan kemudahan untuk transaksi kapan saja dan di mana saja.	Aplikasi PAKINTA sangat bergantung pada jaringan internet.

Faktor Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)
	1. Meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah bagi Bapenda Kota Makassar melalui kolaborasi antara PAKINTA dengan <i>e-wallet</i> 2. Dapat mempermudah wajib pajak melakukan pengecekan dan pembayaran pajak daerah dimana dan kapan saja	Maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (<i>cybercrime</i>).

C. PEMBAHASAN

1. Peran aplikasi PAKINTA dalam Mendukung Inklusi Keuangan serta Meningkatkan PAD

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Bapenda Kota Makassar berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hal ini sesuai dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) suatu model yang memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. *Technology Acceptance Model* menunjukkan bahwa niat seseorang dalam menggunakan suatu sistem atau teknologi ditentukan oleh dua persepsi, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Dalam penerapan aplikasi PAKINTA menggunakan *Technology Acceptance* sebagai penunjang penggunaan PAKINTA. Teori TAM

disini untuk bagaimana suatu penerimaan teknologi baru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: (1) kemanfaatan (*perceived usefulness*) diartikan bahwa penggunaan suatu teknologi akan memberikan manfaat atau peningkatan performanya dimana aplikasi PAKINTA dapat membuat pekerjaan lebih mudah, efektif dan efisien (2) kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) diartikan bahwa penerimaan suatu teknologi dapat diterima jika teknologi tersebut mudah digunakan. Kemudahan suatu teknologi dilihat dari beberapa indikator seperti terampil dalam menggunakan teknologi, mudah dipelajari serta dioperasikan.

Bapenda sebagai instansi pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah harus dapat menyesuaikan kebutuhan dengan berbagai kondisi keuangan inklusif yang sedang berkembang. Dimana perkembangan tersebut dilihat dari sisi kemudahan dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Era digital saat ini, bapenda tidak hanya melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional saja hanya mengandalkan aktivitas lewat kantor, yang cenderung bersifat eksklusif. Melainkan, bapenda terus melakukan inovasi dalam aktivitas pelayanannya. Salah satunya melakukan kerja sama dengan perusahaan *fintech* yang menyediakan akses transaksi pajak daerah melalui dompet digital.

Fitur dompet digital telah diaplikasikan ke dalam layanan pembayaran pajak daerah Kota Makassar, hal ini masyarakat dengan mudah mengakses layanan yang ditawarkan Bapenda. Sehingga Bapenda telah bersifat inklusif, artinya semua layanan yang disediakan dapat di akses oleh masyarakat. Oleh karena itu, bapenda terus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kota Makassar agar terus merasakan dampak positif dari perkembangan teknologi.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa. Aplikasi pakinta itu sendiri sebagai kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pajak daerah secara digital. Hal ini membuktikan bahwa potensi masyarakat untuk beralih dari transaksi *offline* ke *online*. Aplikasi PAKINTA memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan, namun memiliki beberapa kendala dalam penggunaannya. Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dikelompokkan menjadi dua yakni: kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh Bapenda sendiri. dari sisi masyarakat dalam transaksi keuangan yang menggunakan layanan aplikasi digital, akses jaringan internet menjadi salah satu hambatan dasar. Sedangkan dari sisi Bapenda, kelemahan jaringan juga menjadi kendala, sering terjadi permasalahan terkait hal tersebut dikarenakan masih kurangnya akses yang dimiliki Bapenda. Disamping itu permasalahan SDM yang masih kurang dalam bidang teknologi, SDM harus mampu menyeimbangkan antara pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga mampu mendukung pertumbuhan instansi yang terus mengikuti perubahan sistem dengan menerapkan teknologi informasi.

Penggunaan aplikasi PAKINTA yang terdapat pada Bapenda memiliki peran yang cukup penting terhadap peningkatan inklusi keuangan. Hal tersebut disebabkan karena PAKINTA dapat membantu dalam perkembangan teknologi bagi masyarakat. PAKINTA dapat mempercepat inklusi keuangan karena membuka akses yang lebih besar ke layanan keuangan. PAKINTA menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan. Keberadaan PAKINTA semakin diuntungkan dengan masifnya penggunaan smartphone oleh masyarakat, bahkan hingga daerah yang jauh dari pusat kota, menjadi sarana penghubung dan solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh

lembaga keuangan formal. Lewat penggunaan smartphone, masyarakat dapat menggunakan layanan finansial dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil wawancara bahwa sosialisasi dan kreatifitas dalam memperkenalkan aplikasi PAKINTA merupakan mekanisme yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar dalam mewujudkan inklusi keuangan untuk menjangkau masyarakat baik perkotaan maupun yang jauh dari pusat kota karena masyarakat berhak atas layanan keuangan dalam membantu kemudahan proses pengecekan dan pembayaran pajak daerah tanpa perlu datang ke kantor secara langsung.

2. Analisis SWOT Penerapan aplikasi PAKINTA di Bapenda Kota Makassar

2.1. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Setelah dilakukan analisis maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal aplikasi PAKINTA yang berpengaruh terhadap Bapenda Kota Makassar dalam mendukung inklusi keuangan.

a. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki oleh instansi biasanya berwujud sumber daya yang dimiliki oleh instansi baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk meminimalkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan sekitar (Rangkuti, 2008). Adapun kekuatan yang dimiliki oleh PAKINTA pada Bapenda Kota Makassar adalah :

- 1) Hadirnya aplikasi PAKINTA pada era digitalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar, hal ini dikarenakan penggunaan internet di Indonesia tidak terbatas hanya sebagai sarana hiburan dan media sosial, tetapi mencakup penggunaan layanan keuangan

dan komersial. Pangsa pasar penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi menandakan bahwa teknologi informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan kemajuan ini menghasilkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang dihasilkan diantaranya adalah mempermudah untuk berkomunikasi melalui sosial media, mempermudah dalam bertransaksi, efisiensi waktu, memperoleh berita, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebuah perangkat yang di dukung oleh koneksi internet.

- 2) Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja. PAKINTA sangat erat kaitannya dengan internet dan gadget, oleh sebab itu pemanfaatan teknologi dimaksudkan agar masyarakat dapat melakukan segala aktifitas transaksi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data layanan keuangan dan dapat melakukan transaksi dimana saja.

b. Kelemahan

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja. Adapun kelemahan pada aplikasi PAKINTA adalah aplikasi PAKINTA sangat bergantung pada jaringan internet. Ketergantungan tersebut dapat menjadi penghambat sebab, internet atau jaringan di

Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan koneksi internet yang tidak stabil.

2.2. Identifikasi Peluang dan Ancaman

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh aplikasi PAKINTA yang berpengaruh pada Bapenda Kota Makassar.

a. Peluang

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Adapun peluang yang dimiliki aplikasi PAKINTA dan berpengaruh pada Bapenda Kota Makassar:

- 1) Peluang meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah bagi Bapenda Kota Makassar melalui aplikasi PAKINTA. Hal ini didukung karena PAKINTA bekerja sama dengan *e-wallet* untuk efektivitas transaksi, sehingga percepatan pelayanan Bapenda mudah terealisasi ke seluruh daerah Kota Makassar.
- 2) Dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengecekan dan pembayaran pajak daerah. Aplikasi PAKINTA membantu Bapenda untuk memudahkan wajib pajak bertransaksi yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja.

b. Ancaman

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan instansi. Adanya internet memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kemudahan-kemudahan, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Kemudian dampak negatif yang saat ini sering terjadi adalah terjadinya tindak kejahatan akibat dari kemajuan teknologi tersebut atau disebut cybercrime.

Kejahatan-kejahatan yang dihasilkan adalah pemalsuan data pada dokumen penting yang tersimpan di internet, selain itu adanya penipuan yang sering terjadi pada layanan keuangan. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melakukan transaksi secara online.

Berikut merupakan tabel matriks analisis SWOT yang dibuat dengan membandingkan faktor internal yang meliputi strength dan weakness dengan faktor eksternal yang meliputi opportunity dan threat. Matriks analisis SWOT menghasilkan strategi alternatif untuk melakukan perbaikan dan improvisasi bagi instansi khususnya Bapenda Kota Makassar

Tabel 4.3
Tabel Analisis Strategi Matrix SWOT

Faktor Internal	Strategi (S-O) Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Bapenda untuk masyarakat.	Strategi (W-O) Memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali aplikasi PAKINTA.
Faktor Ekternal	Strategi (S-T) Melakukan kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i> .	Strategi (W-T) Melakukan pembaharuan sistem dan layanan dan keamanan sistem transaksi elektronik (<i>cybersecurity</i>).

Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT, maka diperoleh empat alternatif strategi yang dapat digunakan Bapenda Kota Makassar :

a. Strategi (S-O)

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh instansi adalah meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Bapenda untuk masyarakat. Kualitas pelayanan adalah penilaian masyarakat atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. Semakin baik dan memuaskan tingkat pelayanannya maka akan semakin bermutu

usaha yang dihasilkan, sehingga masyarakat merasa puas akan pelayanan dari instansi tersebut. Strategi yang dapat dilakukan Bapenda diantaranya, memberikan penjelasan secara simpatik yang dapat dilakukan oleh pegawai bapenda bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat terkait adanya perubahan sistem dari offline menjadi online, dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat melakukan pembayaran pajak.

b. Strategi (W-O)

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh instansi adalah dengan memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali aplikasi PAKINTA. Sosialisasi ditujukan agar masyarakat mengetahui adanya perkembangan teknologi dalam layanan pembayaran pajak daerah yang semula offline menjadi online. Strategi ini sudah dilakukan oleh Bapenda melalui media konvensional dan media sosial.

c. Strategi (S-T)

Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki instansi untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah melakukan kolaborasi dengan perusahaan *Financial Technology*. Bapenda dengan *Financial Technology* mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan pelayanan, sehingga dengan adanya kolaborasi ini tingkat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan saling melengkapi. Strategi ini telah dilakukan oleh Bapenda melalui kerjasama dengan Ovo, Gopay dan Linkaja.

d. Strategi WT

Strategi WT adalah alternatif strategi yang dapat diterapkan instansi dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh instansi untuk menghindari ancaman yang dihadapi. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bapenda adalah Melakukan pembaharuan sistem dan layanan. Untuk menghindari adanya tindak kejahatan, maka Bapenda Kota Makassar melakukan mitigasi melalui pembaharuan sistem secara berkala selama tiga bulan sekali atau enam bulan sekali seperti menjaga keamanan aplikasi dengan *password* atau PIN otorisasi, melakukan monitoring yang dilakukan oleh tim audit serta meningkatkan keamanan jaringan melalui *cybersecurity* agar dapat menjamin keamanan data wajib pajak dari tindak kejahatan digital (*cybercrime*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan mampu meningkatkan layanan Bapenda bagi wajib pajak dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat menarik masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan sehingga dapat mendukung meningkatkan inklusi keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi PAKINTA berperan dalam mendukung inklusi keuangan, hal tersebut merujuk kepada apa yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan. Dengan adanya aplikasi PAKINTA di Bapenda Kota Makassar, maka masyarakat dapat mengakses dengan mudah layanan pembayaran pajak daerah di Bapenda secara tepat waktu, lancar dan aman tanpa harus datang langsung ke Kantor.
2. Penerapan aplikasi PAKINTA pada Bapenda menunjukkan bahwa Bapenda Kota Makassar memiliki peluang yang besar dalam penerapan digitalisasi pada sistem pelayanannya dikarenakan tingginya tingkat penggunaan smartphone dan internet. Disamping itu terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan transaksi digital di bapenda seperti, masih kurangnya SDM yang siap untuk menjalankan layanan keuangan online dan maraknya kejahatan di dunia teknologi (cybercrime). Berdasarkan hasil analisis SWOT terkait peluang dan tantangan tersebut diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh bapenda yaitu, meningkatkan dan menjamin kualitas layanan dengan memberikan penjelasan terkait adanya perubahan sistem dari offline menjadi online dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terus melakukan pembaharuan sistem layanan, melakukan kerja sama lebih banyak dengan berbagai provider penyedia layanan jaringan internet serta memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi guna meningkatkan keamanan dalam sistem jaringan.

B. SARAN

Penulisan menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teoritis dan praktis masih sangat terbatas. Namun penulis berharap penelitian ini dimasa mendatang dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dengan adanya beberapa masukan. Adapun masukan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya pada layanan pajak daerah satu wilayah saja sehingga hasil penelitian memiliki cakupan yang luas.
2. Bagi Bapenda Kota Makassar diharapkan untuk dapat meningkatkan berbagai layanan digital dengan menambahkan fitur-fitur baru pada aplikasi PAKINTA Serta melakukan Mitigasi Risiko terkait *cyber security*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D., & Wiksuan, I. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Hubungan Dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6420-6444.
- Aldisa, R. T., Maulana, P., & Abdullah, M. A. (2022). Penerapan Big Data Analytic Terhadap Strategi Pemasaran Job Portal. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 267-272.
- Anarjia, K. dan J. Z. Rante. (2018). Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik Sakuku PT. Bank Central Asia, Tbk Kcu Cikarang. *Jurnal Sistem Informasi*. 1(2):1-8.
- Bank Indonesia. (2020). *Keuangan Inklusif*. Retrieved from [bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx)
- BPD DIY, B. (2021). *transformasi untuk terus kompetitif transform to stake competitive*. Retrieved from [islamicmarkets.com: https://islamicmarkets.com/publications/bank-bpd-diy-laporan-tahunan-2021](https://islamicmarkets.com/publications/bank-bpd-diy-laporan-tahunan-2021)
- Budiarti, T., & Nugraha, R. (2020). Implementasi Teknologi Informasi dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Keuangan dan Perbankan*, 356-370.
- Farhan, A., & Salsabil, S. (2019). Internet Of Things : Sejarah Teknologi dan Penerapannya. *Isu Teknologi*, 92-99.
- Junaidi, F. (2021). Transformasi Digital, Pelayanan Publik di Masa Pandemi. *Ekasakti Education Journal*.
- Kadmaer, E. A. (2020). Analisis Efektivitas Pencairan Dana Pada Pemerintah Daerah: Kajian Empiris Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 27-53.
- Kawitan, F. P. dan L. Sulistyawati. (2021). Analisis *Technology Acceptance Model* (TAM) pada Penggunaan Finance Technology "Dana". *JABEISTIK: Jurnal Analitika Bisnis, Ekonomi, Sosial dan Politik*, 1(2): 148-158
- Kemenkeu. (2022, Juni 28). Digitalisasi Transaksi Keuangan. Retrieved from [djpb.kemenkeu: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/majene/id/datapublikasi/artikel.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/majene/id/datapublikasi/artikel.html)
- Kemenkeu. (2022, Agustus 5). *Menuju Era Uang Rupiah Digital*. Retrieved from [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id):

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3950-menuju-era-uang-rupiah-digital.html>

- Kominfo. (2015). *Sistem Pembayaran Digital Terkendala Budaya Masyarakat*. Retrieved from Kominfo.com: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6416/Sistem+Pembayaran+Digital+Terkendala+Budaya+Masyarakat/0/berita_satker
- Kusuma, A. (2021). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Menggunakan Metode Serum. *Procedia of Engineering and Life Science*.
- Miles, M., & Huberman, A. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- OJK. (2018). *peraturan ojk no 12/pojk.03/2018*. Retrieved from ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-objk/Documents/Unduh/PeraturanOJK/Peraturan-OJK-Nomor-12-POJK.03-2018.pdf>
- Pareda, M. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 268-279.
- Pradini, K. T., & Susanti. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Mobile Banking BCA,BRI,BNI . *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 859-872.
- Pramudya, D. G., Sanjaya, I. A., Sari, I. A., & Sucipta, W. G. (2017). Pengaruh Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 39-42.
- Putri, O. A., & Hariyanti, S. (2022). Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen. *Proceedings of islamic Economics*, 1(1).
- Rangkuti, F. (2008, maret 21). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Teknologi informasi dan Teknologi komputer*, 305-314.
- Saputri, O. B. (2021). Analisis swot transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan. *Inovasi*, 17.
- Srihastuti, E., & Suaidah, I. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Efektifitas Pelaporan Akuntansi UMKM di Desa Banyuanyar. *Journal Management, Business, and Accounting*, 355-362.
- Sugiyono, P. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suyanto dan T. A. Kurniawan. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech pada UMKM dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*, 16(1):175-186.
- Tarigan, W. J., & Purba, D. S. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 14-25.
- Tulugen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022, April). transformasi Digital : Pera Kepemilikan Digital. *Jurnal EMBA*, 10, 1116-1123.
- Wartin, N., & Yasa, I. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah. (*SIKD*) *Pemerintah Kabupaten Jembrana*, 1411-1438.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. (Pedoman Wawancara)

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pandangan bapak dengan hadirnya aplikasi pakinta dalam pelayanan di era digital untuk bapenda kota makassar ?
2.	Kendala apa saja yang dihadapi atau yang terjadi dalam penggunaan aplikasi pakinta ?
3.	Sejauh mana peran aplikasi pakinta dalam meningkatkan keuangan inklusif pada bapenda kota makassar ?
4.	Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah daerah dituntut untuk menginovasi layanan yang ada. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai transaksi digital dan apakah penggunaanya sudah efektif ?
5.	Rendahnya literasi keuangan dan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang transaksi digital, langkah atau strategi apa yang dilakukan pihak bapenda untuk menarik wajib pajak dalam penggunaan aplikasi pakinta ?
6.	Pada dasarnya transaksi digital (aplikasi pakinta) memberi banyak kemudahan dalam masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya cybercrime. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai cybercrime dalam penggunaan aplikasi pakinta? dan strategi apa yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cybercrime ?
7.	Semenjak hadirnya aplikasi pakinta, apakah penghasilan asli daerah mengalami peningkatan sebelum adanya aplikasi pakinta ?

Lampiran 2 (Transkrip wawancara)

Coding

FR : Firman Hamid, S.STP.,M.Pub.pol
 ST : Shinta
 WP : Wajib Pajak

No	Coding	Transkrip
1.	FR	adanya aplikasi pakinta di era digital sangat membantu bapenda serta wajib pajak sendiri karena memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dimana kita bisa mengakses dimana dan kapanpun
	ST	iya, adanya aplikasi pakinta dalam era digital saat ini sangat membantu masyarakat kota makassar untuk membayar pajak daerahnya seperti contohnya pbb dimana wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pembayaran
	WP	saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi pakinta yang di sediakan bapenda dimana kita sudah bisa banyak pajak lewat hp, jadi saya tidak perlu lagi ke kantor apalagi dan tidak menyita waktu yang banyak
2.	FR	sejauh ini aplikasi pakinta tidak terlalu ada kendala, ya paling terkendala palingan jaringan yang di gunakan masing masing wajib pajak
	ST	Kalau penggunaan aplikasi pakinta di bapenda sendiri tidak ada kendala, kecuali kendala jaringan pada masing masing wajib pajak itu sendiri
	WP	alhamdulillah, selama ini saya tidak mengalami kendala yang bisa di bilang fatal dalam menggunakan pakinta. hanya terkadang begitu jaringan jelek
3.	FR	Pakinta ini sangat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, dimana wajib pajak dengan mudah mengecek serta membayar pajak tanpa harus datang ke kantor. Dengan adanya pakinta maka wajib pajak atau masyarakat makassar dapat mengakses dengan mudah berbagai jenis layanan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu dan tanpa hambatan
	ST	pakinta memiliki peran penting terlebih lagi seperti kondisi saat ini banyak masyarakat makassar yang memiliki waktu yang terbatas jadi pakinta bisa memudahkan masyarakat makassar membayar pajak dengan tepat waktu tanpa jauh jauh ke kantor
4	FR	pembayaran digitalisasi dapat membantu masyarakat makassar dalam jasa pelayan pembayaran pajak lebih efektif dan efisien, serta sudah mulai berkembang dan sudah efektif dari sisi waktu dan biaya. Namun tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan masyarakat.
	ST	bapenda dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada salah satunya digitalisasi sesuai dengan misi bapenda itu sendiri. Dimana digital ini bertujuan untuk membuat inovasi serta melihat apakah masyarakat sudah menguasai transaksi digital atau tidak. Jika dulu pelayan pembayaran pajak harus ke kantor, sekarang masyarakat cukup melakukannya melalui hp

5.	FR	untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kota makassar awal memperkenalkan aplikasi pakinta kami dari bapenda menyiapkan boot untuk layanan pajak disejumlah pusat perbelanjaan di makassar
	ST	Awal memperkenalkan pakinta kita buat boot di mall, kita juga datangi langsung warga, ada juga warga yang datang karena bootnya ada di depan pintu masuk. Kita sosialisasikan aplikasi pakinta ini terkait dimana kita bisa membayar pajak lebih mudah lagi lewat aplikasi pakinta yang transaksinya bisa melalui via ovo, gopay, linkajadan beberapa proses pembayaran lainnya
6.	FR	cybercrime saat ini sangat meresahkan, diikuti dengan era milenials sekarang dimana segala aktifitasnya menggunakan teknologi menjadi salah satu ancaman. Oleh karena itu, dalam perlindungan aplikasi pakinta, membuat sistem perlindungan agar tidak terjadi cybercrime
	ST	Adanya cybercrime menuntut bapenda meningkatkan keamanan karena pelaku pasti selalu mencari celah untuk melancarkan aksi kejahatan. Untuk meminimalisir kami meningkatkan keamanan dengan metode verivation
7.	FR	Pakinta memiliki peran yang besar dalam peningkatan PAD dimana tahun 2023 ini akan tercatat sebagai sejarah. Kita berhasil meraih PAD rp 1,5 trilliun. Ini tertinggi sepanjang sejarah pemkot makassar
	ST	Pakinta banyak diminati masyarakat buktinya sudah ada 2.400 orang yang mengunduh atau mengakses pakinta. kebanyakan dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)



Lampiran 3 (Triangulasi Sumber)

No	Item Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Interpretasi
1	Bagaimana pandangan bapak dengan hadirnya aplikasi pakinta dalam pelayanan di era digital untuk bapenda kota makassar ?	adanya aplikasi pakinta di era digital sangat membantu bapenda serta wajib pajak sendiri karena memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dimana kita bisa mengakses dimana dan kapanpun	iya, adanya aplikasi pakinta dalam era digital saat ini sangat membantu masyarakat kota makassar untuk membayar pajak daerahnya seperti contohnya pbb dimana wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk melakukan pembayaran	saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi pakinta yang di sediakan bapenda dimana kita sudah bisa banyak pajak lewat hp, jadi saya tidak perlu lagi ke kantor apalagi dan tidak menyita waktu yang banyak	Aplikasi Pakinta membarikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang mana bisa dilakukan melalui smartphone tanpa harus ke kantor lagi.
2	Kendala apa saja yang dihadapi atau yang terjadi dalam penggunaan aplikasi pakinta ?	sejauh ini aplikasi pakinta tidak terlalu ada kendala, ya paling terkendala palingan jaringan yang di gunakan masing masing wajib pajak	Kalau penggunaan aplikasi pakinta di bapenda sendiri tidak ada kendala, kecuali kendala jaringan pada masing masing wajib pajak itu sendiri	alhamdulillah, selama ini saya tidak mengalami kendala yang bisa di bilang fatal dalam menggunakan pakinta. hanya terkadang begitu jaringan jelek	Dalam penggunaan aplikasi pakinta tidak begitu ada kendala berat, kendala yang sering di alami hanya terkendala pada jaringan.
3	Sejauh mana peran aplikasi pakinta dalam meningkatkan keuangan inklusi pada bapenda kota makassar ?	Pakinta ini sangat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, dimana wajib pajak dengan mudah mengecek serta membayar pajak tanpa harus datang ke kantor. Dengan	pakinta memiliki peran penting terlebih lagi seperti kondisi saat ini banyak masyarakat makassar yang memiliki waktu yang terbatas jadi pakinta bisa memudahkan masyarakat makassar		Aplikasi Pakinta memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan yang dimana aplikasi Pakinta ini memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam melakukan pengecekan dan

		adanya pakinta maka wajib pajak atau masyarakat makassar dapat mengakses dengan mudah berbagai jenis layanan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu dan tanpa hambatan	membayar pajak dengan tepat waktu tanpa jauh jauh ke kantor		pembayaran pajak daerah
4	Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah daerah dituntut untuk menginovasi layanan yang ada. Bagaimana menurut bpk/ibu mengenai transaksi digital dan apakah penggunaanya sudah efektif ?	pembayaran digitalisasi dapat membantu masyarakat makassar dalam jasa pelayan pembayaran pajak lebih efektif dan efisien, serta sudah mulai berkembang dan sudah efektif dari sisi waktu dan biaya. Namun tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan masyarakat.	bapenda dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada salah satunya digitalisasi sesuai dengan misi bapenda itu sendiri. Dimana digital ini bertujuan untuk membuat inovasi serta melihat apakah masyarakat sudah menguasai transaksi digital atau tidak. Jika dulu pelayan pembayaran pajak harus ke kantor, sekarang masyarakat cukup melakukannya melalui hp		Pembayaran digitalisasi sangat membantu masyarakat makassar dalam melakukan transaksi pembayaran pajak sehingga transaksi digital ini sangat efektif dari sisi waktu dan biaya.
5	Rendahnya literasi keungan dan masih banyak masyarakat yang belum	untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kota makassar awal memperkenalkan	Awal memperkenalkan pakinta kita buat boot di mall, kita juga datang langsung warga,		Awal memperkenalkan aplikasi pakinta pada masyarakat kota makassar bapenda menyiapkan boot di

	<p>memahami tentang transaksi digital, langkah atau strategi apa yang dilakukan pihak bapenda untuk menarik wajib pajak dalam penggunaan aplikasi pakinta ?</p>	<p>aplikasi pakinta kami dari bapenda menyiapkan boot untuk layanan pajak disejumlah pusat perbelanjaan di makassar</p>	<p>ada juga warga yang datang karena bootnya ada di depan pintu masuk. Kita sosialisasikan aplikasi pakinta ini terkait dimana kita bisa membayar pajak lebih mudah lagi lewat aplikasi pakinta yang transaksinya bisa melalui via ovo, gopay, linkajadan beberapa proses pembayaran lainnya</p>		<p>pusat perbelanjaan untuk melakukan sosialisasi tentang aplikasi pakinta terkait melakukan pembayaran pajak daerah lebih mudah.</p>
6	<p>Pada dasarnya transaksi digital (aplikasi pakinta) membari banyak kemudahan dalam masyarakat akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya peluang akan terjadinya cybercrime. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai cybercrime dalam penggunaan aplikasi pakinta? dan</p>	<p>cybercrime saat ini sangat meresahkan, diikuti dengan era milenials sekarang dimana segala aktifitasnya menggunakan teknologi menjadi salah satu ancaman. Oleh karena itu, dalam perlindungan aplikasi pakinta, membuat sistem perlindungan agar tidak terjadi cybercrime</p>	<p>Adanya cybercrime menuntut bapenda meningkatkan keamanan karena pelaku pasti selalu mencari celah untuk melancarkan aksi kejahatan. Untuk meminimalisir kami meningkatkan keamanan dengan metode verifivation</p>		<p>Adanya cybercrime sangat meresahkan hal ini menuntut bapenda maningkatkan keamanan untuk meminimalisir cybercrime melalui metode verifivation</p>

	strategi apa yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cybercrime ?				
7	Semenjak hadirnya aplikasi pakinta, apakah penghasilan asli daerah mengalami peningkatan sebelum adanya aplikasi pakinta ?	Pakinta memiliki peran yang besar dalam peningkatan PAD dimana tahun 2023 ini akan tercatat sebagai sejarah. Kita berhasil meraih PAD rp 1,5 triliun. Ini tertinggi sepanjang sejarah pemkot makassar	Pakinta banyak diminati masyarakat buktinya sudah ada 2.400 orang yang mengunduh atau mengakses pakinta. kebanyakan dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)		Aplikasi Pakinta telah di undah 2.400 oleh wajib pajak hal ini memiliki peran penting dalam peningkatan PAD dimana tahun 2023 meraih 1,5 triliun



Lampiran 4 (Surat Izin Penelitian)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2959/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 17 Jumadil Awal 1445
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 30 Nopember 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 12/05/A.2-II/XI/45/2023 tanggal 11 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SUDIARDI SALIM
 No. Stambuk : 10573 1110520
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis SWOT Tranformasi Digital Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Mendukung Inklusi Keuangan (Studi Kasus Aplikasi PAKINTA Bapenda Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Desember 2023 s/d 14 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Mh. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM 1127761

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
 Website: dpmpmsp.makassarkota.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: 070/887/SKP/SB/DPMP/SP/12/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/887/SKP/SB/DPMP/SP/12/2023, Tanggal 14 Desember 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 878/SKP/SB/BKBP/12/2023

Dengan Ini Menegaskan Bahwa :

Nama	: SUDIARDI SALIM
NIM / Jurusan	: 105731110520 / Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sh. Alauddin No 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir.
Waktu Penelitian	: 15 Desember 2023 - 15 Januari 2024
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "ANALISIS SWOT TRANSFORMASI DIGITAL TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM Mendukung INKLUSI KEUANGAN (Studi STUDI KASUS APLIKASI PAKINTA BAPENDA KOTA MAKASSAR) "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-12-18 08:23:02



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal.-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sudiardi Salim

Nim : 105731110520

Program Studi : Akuntansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 30 Maret 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Naraspati M.Hum, M.I.P
NPM. 964 591

BAB I Sudiardi Salim

105731110520

by Tahap Skripsi



Submission date: 30-Mar-2024 07:51AM (UTC+0700)
Submission ID: 2334978303
File name: BAB_1_-_2024-03-30T090247.612.docx (28.71K)
Word count: 939
Character count: 6551

BAB I Sudiardi Salim 105731110520

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
2	perpusteknik.com Internet Source	2%
3	tambahpinter.com Internet Source	2%
4	Joshi Wibowo. "The Role of National Brand "Bangga Buatan Indonesia" to Support MSME Resilience in COVID-19 Crisis", Research Square Platform LLC, 2022 Publication	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II Sudiardi Salim

105731110520

by Tahap Skripsi



Submission date: 30-Mar-2024 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2334978483

File name: BAB_II_-_2024-03-30T090249.048.docx (55.01K)

Word count: 3211

Character count: 22424

BAB II Sudiardi Salim 105731110520

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

4%

2

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

3%

3

repository.upi.edu

Internet Source

2%

4

www.scilit.net

Internet Source

2%

5

yunisasisdig.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB III Sudiardi Salim

105731110520

by Tahap Skripsi

Submission date: 30-Mar-2024 07:52AM (UTC+0700)
Submission ID: 2334978625
File name: BAB_III_-_2024-03-30T090251.714.docx (28.94K)
Word count: 797
Character count: 5608

BAB III Sudiardi Salim 105731110520

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	2%
5	asejournal.fapertauim.ac.id Internet Source	2%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On

BAB IV Sudiardi Salim 105731110520

by Tahap Skripsi



Submission date: 30-Mar-2024 07:53AM (UTC+0700)
Submission ID: 2334978858
File name: BAB_IV_2024-03-30T090252.987.docx (359.96K)
Word count: 3953
Character count: 27002

BAB IV Sudiardi Salim 105731110520

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches
Exclude bibliography On





BAB V Sudiardi Salim

105731110520

by Tahap Skripsi

Submission date: 30-Mar-2024 07:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2334979020

File name: BAB_V_-_2024-03-30T090253.782.docx (27.39K)

Word count: 246

Character count: 1651

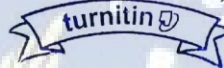
BAB V Sudiardi Salim 105731110520

ORIGINALITY REPORT

4%	0%	4%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Siti Mujiatun, Hanifa Jasin, Muhammad Fahmi, Jufrizen Jufrizen. "Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara", Owner, 2022 Publication	4%
----------	--	-----------



Exclude quotes Exclude matches < 2%
Exclude bibliography



BIOGRAFI PENULIS



Sudiardi Salim panggilan Ardi lahir di Pare-Pare pada tanggal 31 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak Muh. Salim dan Ibu Dewi. Peneliti anak pertama dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kab.Pinrang, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 187 Pinrang lulus tahun 2013, SMPN 1 Pinrang lulus tahun 2016, SMAN 1 Pinrang lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.